PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Jumat Tanggal: 18 Januari 2019 Halaman: 14

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Stimulus PBB Resmi Dihapus

JOGJA—Kebijakan stimulus pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) resmi dihapus. Sejauh ini, masih belum muncul komplain dari warga selaku wajib pajak mengenai adanya kebijakan penghapusan stimulus.

Plt. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja, Kadri Renggono, mengungkapkan selama ini stimulus diberikan kepada warga tidak mampu, veteran dan pensiunan.

Penghapusan stimulus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan situasi di tengah masyarakat. Meski demikian, warga yang keberatan atas kebijakan ini bisa mengajukan keringanan dengan jangka waktu tiga bulan setelah WP menerima surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Selanjutnya, BPKAD tetap akan melakukan klarifikasi di lapangan.

Apabila pengajuan itu disetujui BPKAD, persentase tidak akan lebih dari 75%. Dengan adanya penghapusan stimulus, maka NJOP juga tidak mengalami kenaikan sehingga kalaupun terjadi kenaikan PBB yang dibayarkan oleh WP, maka jumlahnya tidak signifikan

"Kami akan melakukan sosialisasi penghapusan stimulus ini ke 14 wilayah. Tapi kami rasa teman-teman di wilayah [pemerintah kecamatan] sudah melakukannya," kata Kadri seusai penyerahan SPPT PBB P2 dan DHKP PBB P2 tahun anggaran 2019 secara simbolis kepada lurah dan penyerahan surat setoran pajak daerah (SSPD) di Ruang Pandawa, kompleks Balai Kota Jogja, Kamis (17/1).

Kabid Pelayanan, Pendaftaran, dan Penetapan Pendapatan Daerah (P4D) BPKAD Jogja, Ratna Andriati, mengatakan secara persentase sebelumnya stimulus diberikan dalam lima kelas mulai dari 5% hingga 25%. NJOP di Kota Jogja terakhir naik sampai enam kelas pada 2015. Saat ini kenaikan NJOP tidak terjadi sekaligus untuk mencegah adanya polemik di tengah masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Ratna menyatakan BPKAD juga melakukan pemutakhiran data kepada 5.450 objek pajak di Kecamatan Wirobrajan, setelah sebelumnya dilakukan pemutakhiran bagi 1.750 objek pajak di Kecamatan Ngampilan. Pemutakhiran data terus berjalan. BPKAD berharap WP bisa melaporkan perubahan yang terjadi pada objek pajak mereka. "Secara bertahap akan kami teruskan," kata dia.

Camat Pakualaman, Rini Rochmawati, menuturkan untuk mendorong warga tertib membayar PBB, jajarannya menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa apa yang dibayarkan melalui PBB akan kembali kepada warga. (ut Febriarni)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005